

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**RENI KOMBONG**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**RENI KOMBONG  
A31113321**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

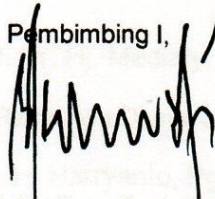
disusun dan diajukan oleh

**RENI KOMBONG**  
**A31113321**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

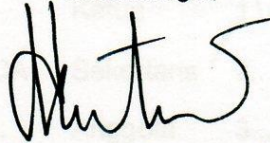
Makassar, 10 Oktober 2017

Pembimbing I,



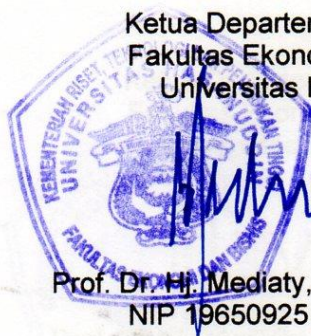
Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing II,



Dr. Ratna Ayu Damayanti S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA  
NIP 19670319 1999203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001



# SKRIPSI

## PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

**RENI KOMBONG**  
**A31113321**

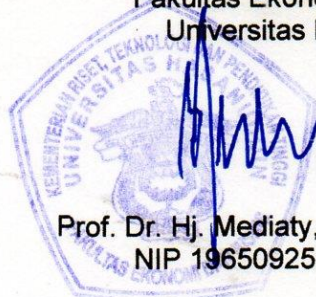
telah dipertahankan dalam ujian sidang skripsi  
pada tanggal **16 November 2017** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA	Sekretaris	2.....
3	Drs. H. Harryanto, Pgd., Acc., M.Com., Ph.D.	Anggota	3.....
4	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....
5	Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	5.....

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19650925 199002 2 001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Reni Kombong

NIM : A31113321

departemen/program studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 September 2017

Yang membuat pernyataan



Reni Kombong

## **PRAKATA**

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas cinta dan kasih-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA, sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberikan bantuan literatur dan berdiskusi dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tana Toraja atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan SKPD Kabupaten Tana Toraja atas partisipasi yang telah diberikan dalam penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah, ibu, dan saudara peneliti atas bantuan dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang telah diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 24 September 2017

Peneliti

## ABSTRAK

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan  
Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja**

***The Effect of Information Technology Usage and Financial Report  
Supervision on Financial Reporting Reliability of Tana Toraja  
Local Government***

Reni Kombong  
Mediaty  
Ratna Ayu Damayanti

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 28 SKPD di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada pegawai SKPD Kabupaten Tana Toraja. Sejumlah 80 kuesioner yang dikembalikan oleh perusahaan menjadi sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan laporan keuangan, keandalan pelaporan keuangan

*This study aimed to prove and analyze the effect of information technology usage and financial report supervision on the reliability of local government financial reporting. Populations used in this study are 28 SKPD Tana Toraja local government. This research was conducted by administering questionnaires to employees of SKPD Tana Toraja local government. A total of 80 questionnaires were returned by the company as sample. Methods of data analysis using multiple linear regression. The result of the regression test showed that information technology usage and financial report supervision a positive and significant effect to financial reporting reliability*

**Keywords:** *information technology usage, financial report supervision, financial reporting reliability*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	 11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	11
2.1.1 Teori Agensi .....	11
2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	13
2.1.3 Pengawasan Laporan Keuangan.....	16
2.1.4 Keandalan .....	21
2.1.5 Pelaporan Keuangan.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	27
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	28
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 31
3.1 Rancangan Penelitian.....	31
3.2 Tempat dan Waktu .....	31
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4.1 Jenis Data.....	32
3.4.2 Sumber Data .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Variabel penelitian dan Definisi Operasional .....	33
3.6.1 Variabel Independen .....	34
3.6.2 Variabel Dependen.....	35
3.7 Instrumen Penelitian .....	37
3.8 Uji Kualitas Data .....	37
3.8.1 Uji Validitas .....	37
3.8.2 Uji Reliabilitas .....	38
3.9 Analisis Data .....	39
3.9.1 Uji Asumsi Klasik .....	39
3.9.1.1 Uji Normalitas.....	39



3.9.1.2 Uji Multikolinearitas .....	39
3.9.1.3 Uji Heteroskedastisitas .....	40
3.10 Uji Hipotesis .....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Karakteristik Responden .....	42
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	45
4.3 Uji Kualitas Data .....	46
4.3.1 Uji Validitas .....	46
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	47
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	48
4.4.1 Uji Normalitas .....	48
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	48
4.4.3 Uji Heterosketastisitas .....	49
4.5 Uji Hipotesis .....	50
4.5.1 Uji Analisis Regresi Berganda.....	50
4.5.2 Uji Signifikansi Parsial .....	51
4.5.3 Koefisien Determinasi .....	52
4.6 Pembahasan .....	53
 BAB IV PENUTUP .....	58
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	59
5.3 Saran Penelitian .....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1	Distribusi Kuesioner ..... 44
4.2	Ikhtisar Demografi Responden ..... 46
4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif..... 47
4.4	Hasil Uji Validitas ..... 49
4.5	Hasil Uji Realibilitas ..... 50
4.6	Hasil Uji Multikolinearitas ..... 51
4.7	Hasil Regresi Berganda..... 53
4.8	Hasil Uji Statistik t ..... 54
4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi ..... 56
4.10	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis ..... 56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	28
2.2 Kerangka Konseptual .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata Peneliti .....	65
2. Peta Teori.....	66
3. Populasi .....	70
4. Kuesioner .....	71
5. Hasil Uji Kualitas Data dan Analisis Data .....	76



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena yang ada dalam perkembangan sektor publik masyarakat Indonesia dimana pemerintah menuntut agar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah tercapai guna terwujudnya *good governace*. Akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelolah sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (Mahmudi 2010:23).

Akuntabilitas dari pengelolaan keuangan pemerintah berupa penyusunan laporan keuangan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adanya tuntutan yang semakin besar untuk melaksanakan akuntabilitas publik mengharuskan manajemen dalam instansi pemerintah salah satunya memberikan informasi laporan keuangan.

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila: (a) dapat diuji kebenarannya (*verifiable*), kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama; (b) netral, tidak

ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu; (c) penyajian secara wajar/jujur (*representational faithfulness*). Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan bidang akuntansi, karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal diperlukan sumber daya yang kompeten dalam bidang ilmu akuntansi. Dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka sumber daya

manusia yang kompeten dan memahami pelaporan keuangan sangat dibutuhkan.

Kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala SKPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota/gubernur.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari

masing-masing kelompok pengguna. Karena laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan akan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Juga tentang operasional pemerintahan dapat dipenuhi dengan baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual bukan basis kas semata. Namun apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan menyajikan suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib dilaporkan demikian (Tanjung, 2011:11).

Informasi relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ada beberapa faktor yang mungkin memberikan pengaruh dalam keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan.

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data



dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks di pemerintahan, harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Masyarakat banyak mempertanyaan dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari.

Secara naluri kegerahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, para pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang telah dipikirkan masyarakat. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumberdaya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf/pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan lembaga pengawas tersebut. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

Beberapa penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah dalam laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut.

1. Ada kejanggalan atau sesuatu yang tidak wajar, yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Tana Toraja tahun 2015, dimana pemerintah dan DPRD setempat tidak membahas dan mengesahkan APBD Perubahan. Banyak hal yang terdapat dalam RAPBD-P yang belum dibahas bersama DPRD, tetapi sudah dilaksanakan oleh pemerintah tidak sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya
2. Persoalan aset ini makin rumit apalagi kabupaten Toraja Utara mekar dan berdiri sendiri.
3. Selain itu, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan serta mempengaruhi penilaian tidak wajar. Tahun 2012 dan 2015 Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja diberi opini tidak wajar. Tahun 2013, 2014 dan 2016 diberi opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Hasil audit BPK tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan. Padahal keterandalan merupakan unsur yang penting terkait dengan pengambilan keputusan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui lebih lanjut masalah terkait keandalan pelaporan keuangan daerah, maka peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Apakah pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pengawasan laporan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka kegunaan teoretis penelitian ini sebagai berikut

1. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan referensi-referensi akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang memengaruhi keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian untuk menambah wawasan mengenai keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.



#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai wawasan tentang pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan tambahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori yang melandasi penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

Bab III merupakan bab metode penelitian. Berisi rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

Bab IV merupakan bab pembahasan. Berisi tentang pengujian tersebut serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan saat melakukan penelitian ini. Bab ini merupakan bab terakhir skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Akuntabilitas publik sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2006).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Hubungan antar Penyelenggaran Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal tidak memperhatikan tanggung jawab vertikal saja. Tujuan yang berikutnya adalah perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas adalah pertanggungjelasn dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah

untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Awalnya akuntansi seperti halnya bidang pengetahuan yang lain belum tersentuh oleh Akademisi, Peneliti dan *Scientist* lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi bidang akuntansi mulai mendapat perhatian dari kalangan peneliti dan ilmuwan. Dimana kemajuan dan perkembangan ekonomi sudah mulai meningkat dan para pelaku bisnis pun mulai bermunculan. Tentunya hal ini perlu didukung oleh kehadiran akuntansi yang akan menunjang terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi tersebut.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan individu yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Bahkan teori agensi juga mengatakan bahwa agen itu bersikap oportunitas dan lebih cenderung menghindari risiko.

Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Implikasi dari teori ini terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya untuk bertindak

sesuai dengan kepentingan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya dengan melibatkan sejumlah aturan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan dimana Pemerintah Daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat yang memenuhi syarat keterandalan yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

### **2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Mustafa *et al.* (2010) secara umum menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari: (a) pemanfaatan perangkat (kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan); (b) pemrosesan dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan serta sistematis dan menyeluruh); dan (c) perawatan (adanya jadwal pemeliharaan peralatan perangkat teknologi informasi secara teratur guna

mendukung kelancaran pekerjaan). Sedangkan menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang andal.

Pemakaian teknologi informasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah data yang bervolume besar. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak mampu melakukannya. Pengelolaan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Untuk mengolah data secara manual biasanya berlaku semakin cepat waktu yang digunakan maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Dengan memperbantuan komputer pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa

sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang diperoleh.

Semakin maju teknologi informasi, semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh para pemakai makin memudahkan dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengubah data akuntansi menjadi informasi atau untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era reformasi berdampak signifikan pada sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas APBD dan informasi akuntansi yang digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan, pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

Kendala yang kemudian dihadapi yaitu minimnya penggunaan teknologi informasi pada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini dan juga tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

### 2.1.3 Pengawasan Laporan Keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Desmiyawati, 2014).

Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean*



*government*). Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pengawasan adalah upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan pemerintah daerah juga menentukan keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain memberikan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif,

yaitu ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki agar informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal (Hendrik, 2014).

Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan ini sangat penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-kesalahan.

Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan laporan keuangan (Tuasikal, 2007).

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip dalam buku Riawan Tjandra yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini.

- A. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan, adalah sebagai berikut.

1. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
  2. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan.
- B. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan, adalah sebagai berikut.
1. Pengawasan *a-priori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
  2. Pengawasan *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.

C. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi, adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek-aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.
2. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara, yaitu menyejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya (Yani, 2002), sebagai berikut.

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-OPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,

- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaandana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,

#### **2.1.4 Keandalan**

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah.

Dalam Rudianto (2012:21) dijelaskan agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Dengan kata lain keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Informasi laporan keuangan harus andal, yaitu bahwa informasi harus bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta informasi juga dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu (a) penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur setiap transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan,

(b) dapat diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tak berbeda jauh, (c) netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu (Fokus Media, 2013:26).

### **2.1.5 Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk nyata terstrukturanya posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2006).

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Laporan Realisasi APBN/D, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Pelaporan keuangan adalah segala aspek.

Adapun unsur-unsur laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran.

#### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan

saldo anggaran lebih menyajikan neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

### 3. Laporan Operasional

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional yang terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

### 4. Laporan Arus Kas

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri atas penerimaan kas yaitu semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah dan pengeluaran kas yaitu semua aliran kas yang keluar dari bendahara negara/daerah.

### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai: (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodek, (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan baik jangka pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat



kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, sebagai berikut.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara
- b) Undang-undang dibidang keuangan negara
- c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- g) Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pusat dan daerah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan. Adriani (2010) melakukan penelitian mengenai keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa memadainya sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan tertibnya pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Diawaty (2015) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah Surakarta. Hasil Uji t menunjukkan bahwa hanya variabel kapasitas sumber daya manusia, pengawasan laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah sedangkan pengendalian internal tidak berpengaruh.

Penelitian serupa juga dilakukan Desmiyawati (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sumber daya manusia dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Arifianti (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan laporan keuangan tidak mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Sedangkan Azlan (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

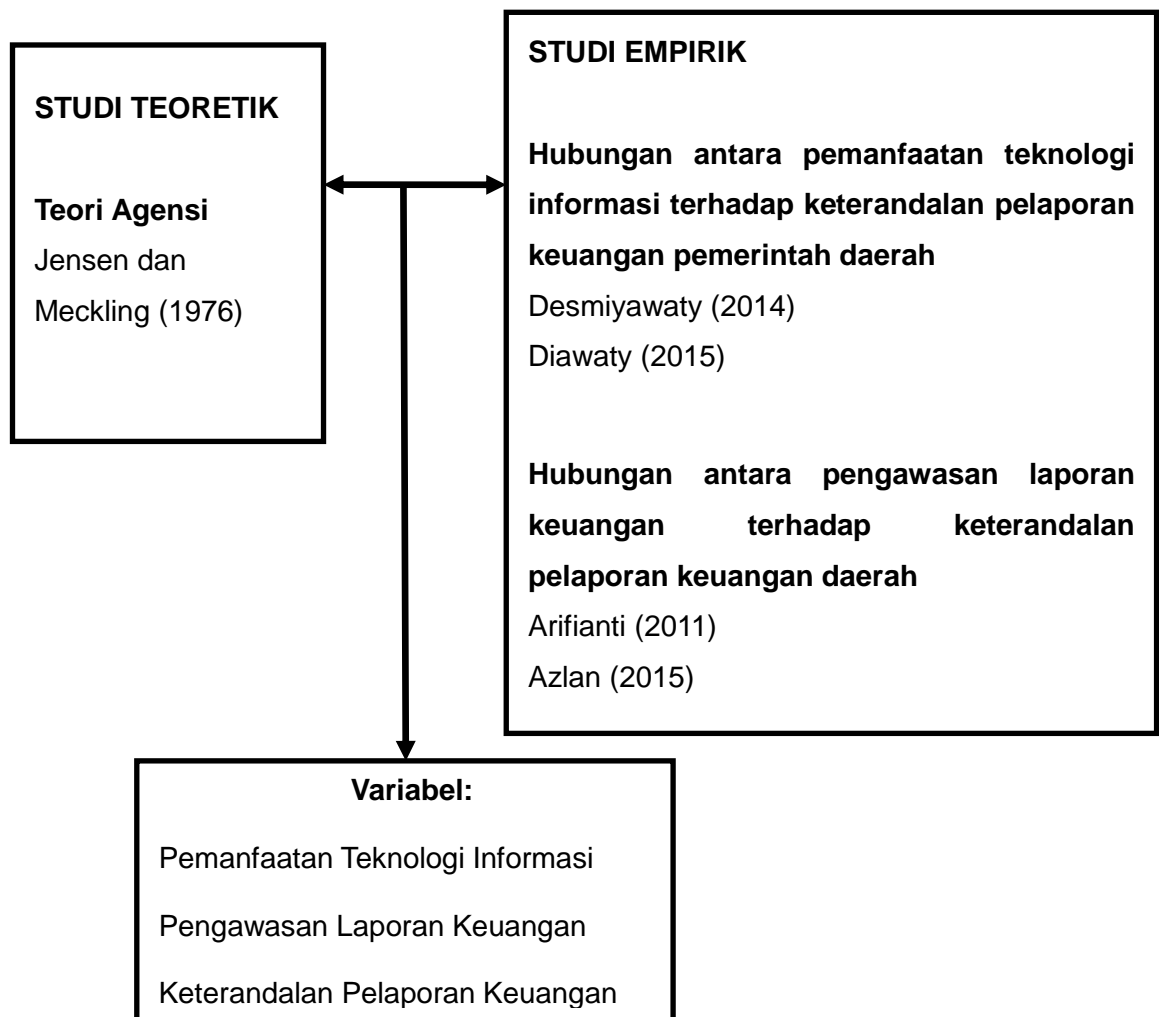
Penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, ada penelitian yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan

laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan, namun tetapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa pengawasan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, peneliti ingin membuktikan sendiri pengaruh pemanfaatan teknologi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai laporan keuangan yang andal maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan maksimalnya pengawasan laporan keuangan. berdasarkan hal inilah maka dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Kualitas sistem informasi adalah kualitas dari informasi yang dihasilkan apakah telah memiliki karakteristik informasi yang baik dan berguna bagi para

pemakai informasi. Sistem informasi yang berkualitas dapat digunakan sesuai dengan keinginan para pengguna dan dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap (Fitrih, 2016).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemerintah daerah bertindak sebagai *stewards*, penerima amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya (Hawing, 2017).

Penelitian Indriasari (2008), Widyaningrum *et al.* (2010); Adriani (2010); Rosalin *et al.* (2011) dan Hullah *et al.* (2012) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu peneliti mengajukan hipotesis.

H1: pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

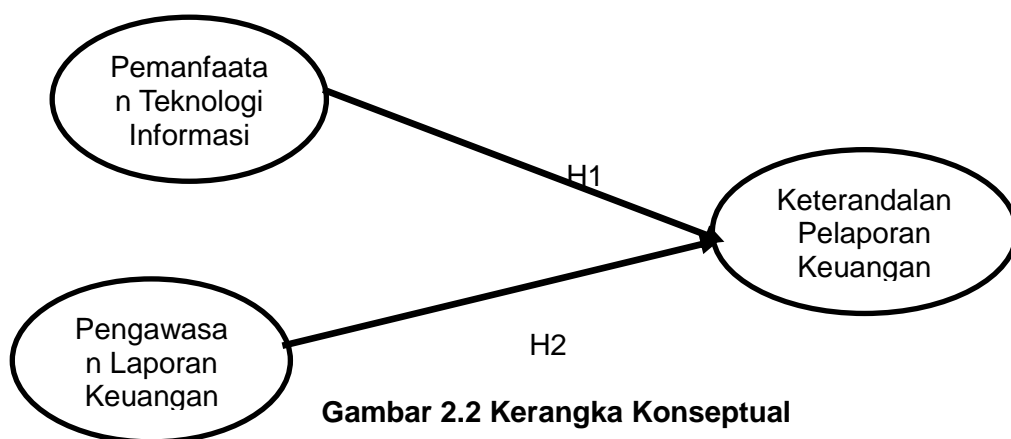
#### **2.4.2 Pengaruh Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan**

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan wajar terhadap efektivitas dan efisiensi perundangan-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dilakukan secara terus menerus. Di samping itu, diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penelitian Arifianti (2011) tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa et al. (2011) membuktikan bahwa pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan Azlan (2014) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah uji hipotesis, yang merupakan bagian sangat penting dalam penelitian ini. Pada bagian inilah yang menjadi penentu apakah penelitian ini cukup ilmiah atau tidak. Dalam melakukan uji hipotesis harus ada sampel penelitian, pengukuran instrumen dan mengikuti prosedur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan akan diolah untuk mengetahui tingkat validitas dan realibilitas dari hipotesis yang dikembangkan. Hipotesis yang disajikan nantinya apakah mendukung atau tidak mendukung hipotesis, juga membuktikan atau tidak membuktikan hipotesis.

Rancangan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, memperlihatkan kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan kejadian sebenarnya.

#### **3.2 Tempat dan Waktu**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih satu (1) bulan.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010:115) mengemukakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari yang kemudian ditarik untuk membentuk sebuah kesimpulan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 instansi pada SKPD Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri atas 21 dinas, satu kantor dan enam badan (data terlampir).

Metode yang digunakan adalah sensus dengan menggunakan *purposive sampling* dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi serta yang dapat memberikan informasi yang diinginkan entah karena satu-satunya yang memiliki atau memengaruhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti. Kriteria responden yang nantinya digunakan dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari Kepala Dinas, Pelaksana Keuangan dan Bagian Pelaporan dengan mengambil sampel sebanyak 3 (tiga) orang dari tiap Dinas, Kantor dan Badan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa skor atau nilai yang telah diolah dari jawaban-jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada pegawai Kabupaten Tana Toraja. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dimana variabel pemanfaatan teknologi informasi menggunakan kuesioner Majid (2016), variabel pengawasan laporan keuangan menggunakan kuesioner Desmiyawati



(2014) serta variabel keandalan pelaporan keuangan menggunakan kuesioner Soimah (2014).

#### **3.4.2 Sumber Data**

Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama melalui kuesioner, wawancara, *focus groups*, atau observasi yang digunakan dengan maksud tertentu (Sekaran, 2009:36). Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui kuesioner kepada pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka digunakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian dan tiap jawaban diberi nilai atau skor. Penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

#### **3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan dua (2) variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1), pengawasan laporan

keuangan (X2) dan variabel dependen menggunakan satu (1) variabel yaitu keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y).

### **3.6.1 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel independen dengan rincian sebagai berikut.

#### **1. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap/prilaku akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang andal.

Untuk meneliti variabel ini peneliti mengadopsi kuesioner Majid (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert* lima point dengan rincian sebagai berikut (1) tidak setuju, (2) kurang setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

## 2. Pengawasan laporan keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Desmiyawati 2014).

Untuk memperoleh data pengaruh pengawasan laporan keuangan maka peneliti menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Desmiyawati (2014). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert* lima *point* dengan rincian sebagai berikut (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral (4) setuju (5) sangat setuju.

### 3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

#### 1. Keandalan pelaporan keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 keandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila.

- a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*). Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
- b. Netral. Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Penyajian secara wajar/jujur (*representational faithfulness*). Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014). Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang berkaitan dengan masalah keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jawaban

dari responden akan diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 5 (lima) poin dengan rincian sebagai berikut (1) tidak setuju (2) kurang setuju (3) netral (4) setuju (5) sangat setuju.

### **3.7 Intrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu *valid* dan *reliable*. Untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan-kesimpulan terhadap hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

### **3.8 Uji Kualitas Data**

Kuesioner yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu *valid* dan *reliable*. Untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat menjamin mutu dari penelitian sehingga kesimpulan-kesimpulan terhadap hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan sehingga hasil penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **3.8.1 Uji Validitas**

Menurut Sugiyono (2015) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Pengawasan Laporan (X2), dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Uji validitas ini menggunakan *confirmatory factor analysis*. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi variabel.

### **3.8.2. Uji Reliabilitas**

Menurut Sugiyono (2015) uji reliabilitas merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang *reliable*, namun bukan berarti hasil (data) penelitian menjadi *reliable* karena hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti, dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi.

### **3.9. Analisis Data**

Analisis data berisi pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima, sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh yang bersifat linear yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung, Gujarati (2016) regresi linear berganda, yakni regresi dimana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas, digunakan untuk

menjelaskan perilaku variabel tak bebas.

### **3.9.1. Uji Asumsi Klasik**

Menurut Gujarati (2016) agar model regresi tidak bias maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi.

#### **3.9.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Kuncoro, 2011). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *Normal P-Plot*. Distribusi data dinyatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### **3.9.1.2 Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas, (Kuncoro, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

### 3.9.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *scatter plot*. Suatu penelitian dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada *scatter plot* titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik ordinal (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

### 3.10. Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi linear berganda digunakan jika pada kasus terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y : Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2 : Pengawasan laporan keuangan

b : Koefisien regresi

e : error

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis pertama, bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dilihat dari aspek pemanfaatan perangkat lunak pengelola keuangan daerah, penggunaan komputer dalam melaksanakan fungsi akuntansi, memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan serta memahami dan menguasai teknologi komputer mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan berupa penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa agen bersifat oportunitis dan cenderung tidak menyukai resiko, oleh karenanya pemerintah harus membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal

2. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua, bahwa variabel pengawasan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pengawasan laporan keuangan yang dimaksudkan adalah pengawasan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, evaluasi kinerja melalui kegiatan pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan berdasarkan waktu dan bukti yang akurat, pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara *agent* dan *principal*, akan timbul masalah jika terdapat informasi yang asimetri dan menyebabkan *agent* cenderung melakukan perilaku disfungsional (*disfunctional behaviour*) contohnya adalah memanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan *principal* sehingga pelaporan keuangan tidak menggambarkan kondisi pemerintahan yang sebenarnya namun akan menunjukkan kinerja yang baik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin efektifnya pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan maka semakin andal pula laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan baik itu dari individu peneliti maupun dari faktor lain yang memungkinkan memberikan efek terhadap hasil penelitian, antara lain sebagai berikut.

- a. Responden penelitian ini lebih didominasi oleh staf, sedangkan yang dimaksudkan penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan dan kepala bagian pelaporan.
- b. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja yang memberikan izin penelitian kepada peneliti untuk mengambil data dalam bentuk kuesioner, namun masih ada yang beberapa yang tidak bersedia untuk mengisi kuesiner.

### **5.3 Saran Penelitian**

Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal di antaranya.

- a. Lebih memfokuskan responden penelitian pada pihak-pihak yang lebih memahami pelaporan keuangan yaitu bendahara dan kasubag keuangan serta menggunakan instrument lain seperti wawancara.
- b. Bagi pemerintah, agar pemanfaatan teknologi dalam hal pengelolaan data keuangan yang telah menggunakan *software* sesuai peraturan lebih ditingkatkan lagi dan perlu meningkatkan pendampingan dalam operasional sistem perangkat lunak pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin andal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69-80.
- Azlan, Muhammad. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol 3, Nomor 2, Juni 2015, hal 188-198.
- Donaldson. Lex, Davis James H . 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Covernance and Shareholders Return" *Autralian Journal of Management*. Vol.16 iss. 1.
- Efendi, Loli. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 3 Nomor 2, September 2017. ISSN 2502-6976
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. Yogyakarta : BPFE.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, D. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). *Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi*. UGM.
- Haliah. 2012. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.

- Hawing, Yusra Agurista.2017. *Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan Aktivitas Penganggaran pada Pemerintah Daerah Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Indriasari Desi, Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). *Kumpulan Simposium nasional akuntansi XI di Pontianak, 23-24 Juli*.
- Karmila Tanjung, A,R. Darlis,Edfan.-.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vol 9. No.1:1-121 ISSN 1907-364X.
- Karmita, Fitrih. 2016. *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi*. Tesis Akuntansi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Kuangan daerah, kementrian dalam negeri. 2014. *Modul 1 konsep dan siklus akuntansi pemda*.<http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-pemerintah-daerah>. Diakses pada 22 September 2017
- Megayanti, Ayu Priska. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana). *Jurnal Akuntansi Program S-1* (Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015)
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol 2 No. 1, Hal 1-17.
- Primaya, Kadek Hengki. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengawasan Laporan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program Studi S1*, Vol 2, Nomor 1 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- ,Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokus Media

Rini Indriani, Wahiddatul Khoiriyah. 2010. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri. *Simposium Nasional Akuntansi XIII* - Purwokerto

Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

Sekaran, Uma. 2009. *Research Method for business*. Terjemahan Kwan Men Yon, 2010. Jakarta: Salemba Empat.

Soimah, Siti. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bengkulu Utara: Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Situs Resmi BPKP 2017 <http://makassar.bpk.go.id/>, diakses pada 31 Mei 2017

Sugijayanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU no. 22/25 Tahun 1999. *Jurnal Lintas Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal 50-66.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, 2008. *Penerapan Good Corporate Governnace*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suwarjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekrayaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPYE.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2011. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua Pendekatan Teknis Sesuai PP No.71/2010*. Bandung: Alfabeta.

Tjandra Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja unit SKPD pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 10 No 1 Hal 66-82.

Ulum, Ihyaul, MD., 2004, *Akuntansi Sektor Publik; Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain, dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta : Andi

Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Andi

Widyaningrum Celviana, Rahmawati. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan. Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Subosukawonosraten). *Jurnal AkuntansiSNA XIII*. Purwokerto.

Zetra, Aidinil. 2009. *Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, *Jurnal Akuntansi*.



**Lampiran I Biodata****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Reni Kombong

Tempat, Tanggal Lahir : Buntu Tabang, 03 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Rumah : Jln. Bilawaiyah No. 35, Makassar

Telpon Rumah dan HP : -/ 082292433586

Alamat E-mail : renikombong38@gmail.com

**Riwayat Pendidikan :****a. Pendidikan Formal**

- SDN 139 Tampapute (2001-2007)
- SMPN 2 Mengkendek (2007-2010)
- SMAN 3 Makale (2010-2013)

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 24 September 2017

Reni Kombong

No	Penulis/Topik /Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/Isi Buku
1.	Havid Sularso, Erly Setyowati Nugraheni Jurnal Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Vol 4, No.1	Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi.	Hipotesis penelitian ini yaitu. 1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan 2. Kapasitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi. 3. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. 4. Komitmen organisasi	Terdapat tiga variabel bebas, yaitu. 1. Kapasitas sumber daya manusia 2. Pemanfaatan teknologi informasi 3. Komitmen organisasi  Terdapat dua variabel terikat, yaitu. 1. Keterandalan 2. Ketepatanwaktuan  Dan satu variabel moderasi yaitu pengendalian intern	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis pertama diterima dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan 2. Hipotesis kedua bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan tetapi pengendalian intern sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi 3. Hipotesis pertama diterima dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. 4. Hipotesis keempat diterima bahwa komitmen organisasi sangat berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

			adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan		
2.	Loli Efendi , Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.V ol 3 Nomor 2, September 2017.ISSN 2502-6976	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengawasan keuangan daerah baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah.	Hipotesis penelitian ini adalah. 1. Pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. 2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 4. Pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.	Terdapat tiga variabel bebas, yaitu. 1. Kualitas aparatur daerah. 2. Pemanfaatan teknologi informasi. 3. Pengawasan laporan keuangan  Terdapat satu variabel terikat yaitu keterandalan laporan keuangan daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Hipotesis pertama diterima bahwa kualitas aparatur daerah sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dimana sumber daya manusia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. 2. Hipotesis kedua diterima dimana pemanfaatan teknologi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan keakuratan perhitungan lebih besar sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 3. Hipotesis ketiga diterima bahwa pengawasan laporan keuangan yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 4. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan laporan

					keuangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
3.	Kadek Hengki Primayana. Pengaruh kapaistas SDM, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan <i>IT</i> dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi S1 Universitas Ganesha.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah.	Hipotesis dari penelitian ini adalah. 1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. 2. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. 3. Pengaruh pemanfaatan <i>IT</i> terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. 4. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. 5. Pengaruh kapasitas SDM, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan <i>IT</i> dan pengawasan laporan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.	Terdapat empat variabel bebas, yaitu. 1. Kualitas SDM 2. Pengendalian Intern Akuntansi 3. Pemanfaatan <i>IT</i> 4. Pengawasan Laporan Daerah.  Dan satu variabel terikat yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah.  Teknik analisis yang digunakan yaitu uji analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS.	Hasil dari penelitian ini adalah. 1. Hipotesis pertama diterima, bahwa semakin memadai kapasitas SDM maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. 2. Hipotesis kedua diterima, bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi, maka akan semakin baik pula pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. 3. Hipotesis ketiga diterima, bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan daerah. 4. Hipotesis empat diterima dimana pengawasan laporan daerah yang semakin baik akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. 5. Hipotesis lima menjelaskan bahwa kapasitas SDM, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi dan pengawasan laporan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
4.	Muhammad Azlan Pengaruh	Tujuan dari penelitian ini adalah	Teori yang dikembangkan adalah teori agensi, bahwa karena adanya asimetri	Terdapat empat variabel bebas yaitu. 1. Kapasitas SDM	Hasil dari penelitian ini adalah. 1. Hipotesis pertama diterima karena sumber daya manusia yang berperan

	<p>Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, Pengendalian Intern dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol 2 No.3 Juni 2015, hal 188-198</p>	<p>mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan daerah.</p>	<p>informasi maka dibutuhkan agen untuk membantu pihak prinsipal.</p> <p>Adapun hipotesis yang dikembangkan yaitu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh kapasitas SDM terhadap keandalan laporan keuangan daerah.</li> <li>2. Pengaruh pemanfaatan TI terhadap keandalan laporan keuangan daerah.</li> <li>3. Pengaruh pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan daerah.</li> <li>4. Pengaruh pengawasan laporan keuangan terhadap keandalan laporan keuangan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemanfaatan TI</li> <li>3. Pengendalian Intern</li> <li>4. Pengawasan Laporan Keuangan</li> </ol> <p>Terdapat satu variabel terikat yaitu keandalan laporan keuangan daerah.</p> <p>Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.</p>	<p>dalam penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan, dari segi pendidikan, pelatihan dan pengalaman akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hipotesis kedua diterima, bahwa keandalan laporan keuangan tercapai apabila dilaksanakan oleh SDM yang berkualitas serta didukung dengan pemanfaatan TI untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan.</li> <li>3. Hipotesis tiga diterima, bahwa sistem pengendalian internal menekankan tindakan pencegahan kekeliruan dan kesengajaan sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan valid dan benar.</li> <li>4. Hipotesis empat diterima bahwa informasi yang relevan dan reliabel dapat tercapai apabila dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersangkutan.</li> </ol>
--	--	---	--	---	---

### Lampiran III Populasi

No.	Nama SKPD	Pihak yang mengisi Kuesioner				
		Kepala Instansi	Sekretaris	Bendahara	Kepala Bagian	Staf
1	Dinas Pendidikan	1		1	1	
2	Dinas Kesehatan		1	1	1	
3	Dinas PU dan Tata Ruang	Tidak Ada yang kembali				
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1			1	1
5	Dinas Perhubungan			1	1	1
6	Dinas Pertanian	1		1	1	
7	Dinas Pariwisata		1		1	1
8	Dinas Kebudayaan	1		1	1	
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			1	1	1
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Satu tidak kembali			1	1
11	Badan Pendapatan Daerah	1		1	1	
12	Satuan Polisi Pamong Praja ( Sat-Pol PP )		1		1	1
13	Dinas Perdagangan dan Industri			1	1	1
14	Dinas Kearsipan danKeperpustakaan			1	1	1
15	Dinas Koperasi dan UMKM			1	1	1
16	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah	1			1	1
17	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1	1	1
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		1		1	1
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			1	1	1
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			1	1	1
21	Dinas Komunikasi dan Informatika			1	1	1
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB			1	2	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	1			1	1
24	Dinas Lingkungan Hidup			1	1	1
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	1	1	
26	Dinas Sosial				1	2
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1	2	
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1		1	1	
		8	5	19	29	19

**Lampiran IV Kuesioner Penelitian****KUISIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu/Sdr/Sdri**

**Pegawai Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja**

Di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang sementara melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan data/informasi dari Bpk/Ibu. Mohon partisipasi dari Bpk/Ibu sebagai pelaksana akuntansi/keuangan untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan persepsi Bpk/Ibu. Semua data/informasi yang diberikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Demikian, atas kesedian dan partisipasi Bpk/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya ,

Reni Kombong

**I. Identitas Responden**

Nama :  
Alamat :  
Usia : ... tahun  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Masa Kerja : ... tahun



## **II. Cara pengisian Kuesioner:**

Mohon Bapak/Ibu memberi tanda Centang (✓) pada salah satu jawaban yang benar menurut Bapak/Ibu.

Keterangan:

**\*TS : Tidak Setuju**

**\*KS : Kurang Setuju**

**\*N : Netral**

**S : Setuju**

**\*SS : Sangat Setuju**

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)**

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>TS</b>	<b>KS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas.					
2	Pengelolaan data transaksi keuangan di instansi/lembaga tempat saya bekerja menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan.					
3	Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja dihasilkan dari sistem informasi yang tersruktur.					
4	Ditempat saya bekerja proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi					
5	Saya sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan.					
6	Di tempat saya bekerja Teknologi informasi memberi kemudahan dalam					

	pembuatan laporan keuangan					
7	Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, lebih cepat, mudah dan akurat.					
8	Pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar yang dibutuhkan bagi staf pengelola.					
9	Staf di unit kerja terkait tempat saya bekermemperoleh pendampingan dalam operasionalisasi sistem perangkat lunak pemerintah daerah.					
10	Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya.					

Sumber: Majid (2016)

### **Pengawasan Pelaporan Keuangan (X2)**

<b>No.</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>TS</b>	<b>KS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.					
2	Ditempat saya bekerja Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan).					
3	Setiap kegiatan/transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.					
4	Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.					

5	Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik.					
6	Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.					
7	Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu.					

Sumber: Desmiyawati (2014)

#### Keandalan Pelaporan Keuangan (Y1)

No.	Pernyataan	TS	KS	N	S	SS
1	Transaksi yang telah disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan					
2	Informasi yang disajikan oleh instansi/lembaga tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material					
3	Instansi/lembaga tempat saya bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus					
4	Ditempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan memenuhi kriteria andal					

Sumber: Soimah (2015)

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1
X1.1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	1  80	,349"  80	,346"  80	,283'  80	,350"  80	,157  80	,237'  80	,361"  80	,441"  80	,374"  80	,561'  80
X1.2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,349"  80	1  80	,388"  80	,408"  80	,517"  80	,463"  80	,368"  80	,565"  80	,461"  80	,462"  80	,739'  80
X1.3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,346"  80	,388"  80	1  80	,440"  80	,302"  80	,544"  80	,561"  80	,496"  80	,491"  80	,420"  80	,717'  80
X1.4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,283'  80	,408"  80	,440"  80	1  80	,534"  80	,476"  80	,315"  80	,390"  80	,447"  80	,385"  80	,698'  80
X1.5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,350"  80	,517"  80	,302"  80	,534"  80	1  80	,633"  80	,129  80	,329"  80	,478"  80	,380"  80	,689'  80
X1.6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,157  80	,463"  80	,544"  80	,476"  80	,633"  80	1  80	,351"  80	,342"  80	,413"  80	,501"  80	,718'  80
X1.7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,237'  80	,368"  80	,561"  80	,315"  80	,129  80	,351"  80	1  80	,489"  80	,322"  80	,412"  80	,604'  80
X1.8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,361"  80	,565"  80	,496"  80	,390"  80	,329"  80	,342"  80	,489"  80	1  80	,350"  80	,457"  80	,700'  80
X1.9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,441"  80	,461"  80	,491"  80	,447"  80	,478"  80	,413"  80	,322"  80	,350"  80	1  80	,360"  80	,692'  80
X1.10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,374"  80	,462"  80	,420"  80	,385"  80	,380"  80	,501"  80	,412"  80	,457"  80	,360"  80	1  80	,701'  80
X1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)  N	,561"  80	,739"  80	,717"  80	,698"  80	,689"  80	,718"  80	,604"  80	,700"  80	,692"  80	,701"  80	1  80

## 1.2 Pengawasan Laporan Keuangan (X2)

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,466**	,447**	,232*	,368**	,282*	,354**	,636**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,039	,001	,011	,001	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	,466**	1	,631**	,329**	,297**	,491**	,458**	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,007	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	,447**	,631**	1	,514**	,229*	,415**	,553**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,041	,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	,232*	,329**	,514**	1	,428**	,380**	,418**	,662**
	Sig. (2-tailed)	,039	,003	,000		,000	,001	,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.5	Pearson Correlation	,368**	,297**	,229*	,428**	1	,492**	,305**	,628**
	Sig. (2-tailed)	,001	,007	,041	,000		,000	,006	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.6	Pearson Correlation	,282*	,491**	,415**	,380**	,492**	1	,581**	,735**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,000	,001	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2.7	Pearson Correlation	,354**	,458**	,553**	,418**	,305**	,581**	1	,739**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,006	,000		,000
	N	80	80	80	80	80	80	80	80
X2	Pearson Correlation	,636**	,750**	,782**	,662**	,628**	,735**	,739**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80	80	80	80

### 1.3 Keandalan Pelaporan Keuangan (Y)

Correlations		Y1	Y2	Y3	Y4	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,418**	,414**	,357**	,739**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
	N	80	80	80	80	80
Y2	Pearson Correlation	,418**	1	,323**	,318**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,000		,003	,004	,000
	N	80	80	80	80	80
Y3	Pearson Correlation	,414**	,323**	1	,442**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
Y4	Pearson Correlation	,357**	,318**	,442**	1	,746**
	Sig. (2-tailed)	,001	,004	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
Y	Pearson Correlation	,739**	,706**	,730**	,746**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2 Variabelreliability

### 2.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Case Processing Summary		
	N	%
Cases		
Valid	80	100,0
Excluded <sup>a</sup>	0	,0
Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,872	,872	10

## 2.2 Pengawasan Laporan Laporan Keuangan

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,831	,831	7

## 2.3 Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	80	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	80	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,705	,709	4

### 3. Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	80	34,00	50,00	43,9000	3,90585
x2	80	21,00	35,00	30,8750	2,72064
Y	80	13,00	20,00	17,3625	1,63230
Valid N (listwise)	80				

**Statistics**

		x1	x2	Y
N	Valid	80	80	80
	Missing	0	0	0

**x1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34,00	1	1,3	1,3	1,3
	37,00	4	5,0	5,0	6,3
	38,00	2	2,5	2,5	8,8
	39,00	2	2,5	2,5	11,3
	40,00	12	15,0	15,0	26,3
	41,00	6	7,5	7,5	33,8
	42,00	3	3,8	3,8	37,5
	43,00	2	2,5	2,5	40,0
	44,00	4	5,0	5,0	45,0
	45,00	16	20,0	20,0	65,0
	46,00	8	10,0	10,0	75,0
	47,00	7	8,8	8,8	83,8
	48,00	2	2,5	2,5	86,3
	49,00	1	1,3	1,3	87,5
	50,00	10	12,5	12,5	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

**x2**

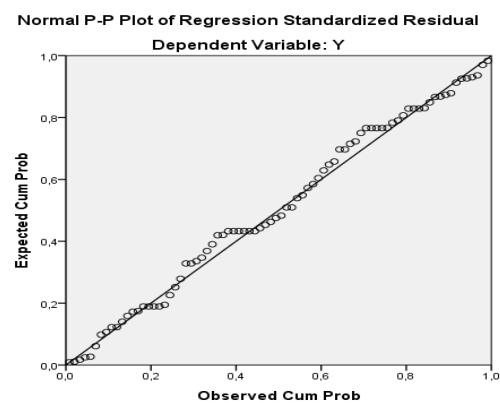
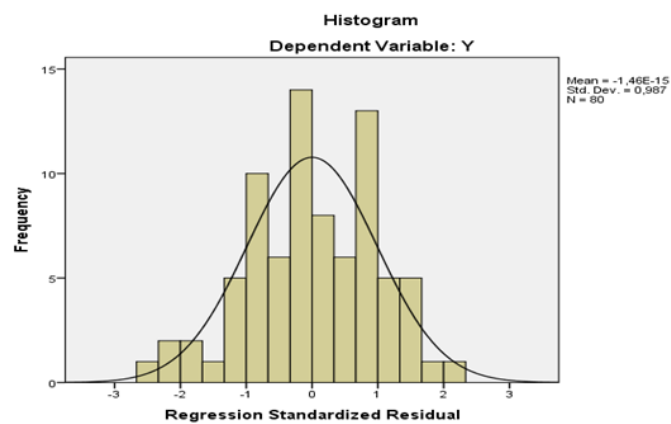
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21,00	1	1,3	1,3	1,3
	26,00	1	1,3	1,3	2,5
	27,00	3	3,8	3,8	6,3
	28,00	14	17,5	17,5	23,8
	29,00	10	12,5	12,5	36,3
	30,00	5	6,3	6,3	42,5
	31,00	7	8,8	8,8	51,3
	32,00	17	21,3	21,3	72,5
	33,00	10	12,5	12,5	85,0
	34,00	1	1,3	1,3	86,3
	35,00	11	13,8	13,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	



Y					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13,00	1	1,3	1,3	1,3
	15,00	9	11,3	11,3	12,5
	16,00	16	20,0	20,0	32,5
	17,00	21	26,3	26,3	58,8
	18,00	8	10,0	10,0	68,8
	19,00	16	20,0	20,0	88,8
	20,00	9	11,3	11,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### 4.1 Uji Normalitas

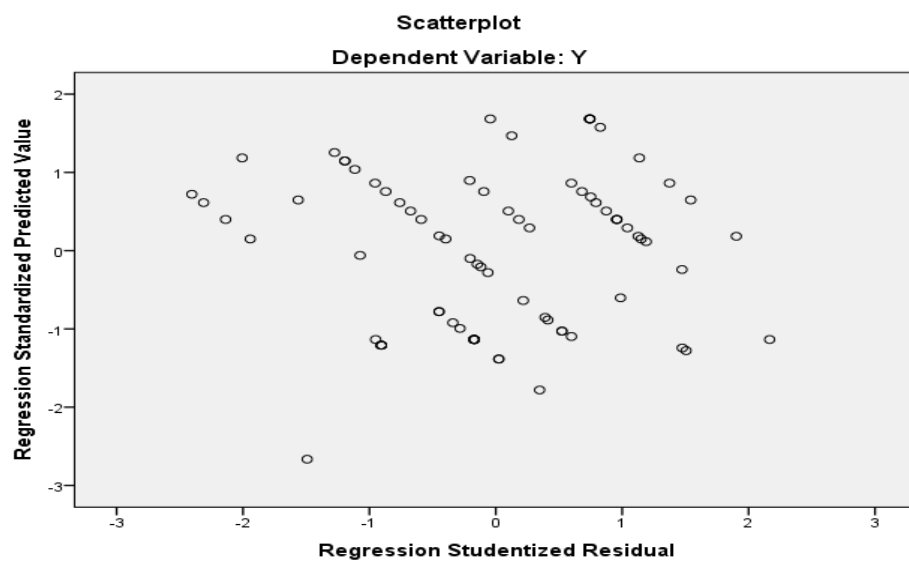


## 4.2 Uji Multikoleniaritas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
X1	,526	,245	,199	,591	1,693
X2	,583	,378	,321	,591	1,693

a. Dependent Variable: Y

## 4.3 Uji Heteroskedastisitas



## 5.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

### 5.1.1 Uji Hipotesis

**Hasil Uji Hipotesis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,877	1,833		2,661	,009
	X1	,108	,049	,259	2,216	,030
	X2	,251	,070	,418	3,578	,001

a. Dependent Variable: Y

### 5.1.2 Uji Koefisien Determinan

**Hasil Uji Koefisien Determinan**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616 <sup>a</sup>	,380	,364	1,30214

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

### 5.1.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,877	1,833		2,661	,009
	X1	,108	,049	,259	2,216	,030
	X2	,251	,070	,418	3,578	,001

a. Dependent Variable: Y